



NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**NOMOR : 8/KSP/VII/2012
NOMOR : 35/K/DPRD/2012**

TANGGAL: 30 JULI 2012

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2012**



NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : 8/KSP/VII/2012
NOMOR : 35/K/DPRD/2012

TANGGAL: 30 JULI 2012

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013,**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **N a m a** : Hamengku Buwono X
 J a b a t a n : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
 Alamat Kantor : Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. 1. **N a m a** : H. Yoeke Indra Agung Laksana, SE
 J a b a t a n : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
 Daerah Istimewa Yogyakarta
 Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

2. N a m a : Kol (Purn.) H. Sukedi
J a b a t a n : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta
3. N a m a : Hj. Tutiek Masria Widyo, SE
J a b a t a n : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta
4. N a m a : Janu Ismadi, SE
J a b a t a n : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2013.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2013, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2013.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2013 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2013.

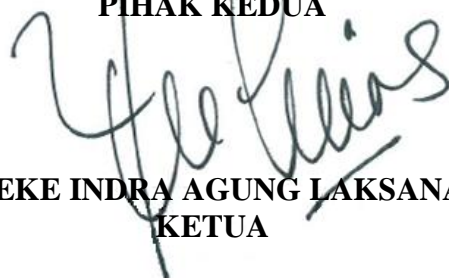
Yogyakarta, 30 Juli 2012

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
selaku
PIHAK PERTAMA

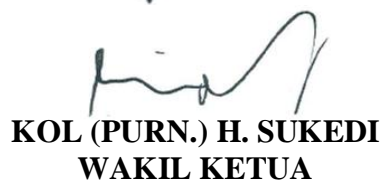


HAMENGKU BUWONO X

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DIY**
selaku
PIHAK KEDUA



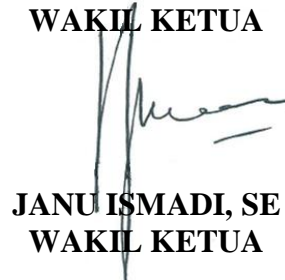
**H. YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA, SE
KETUA**



**KOL (PURN.) H. SUKEDI
WAKIL KETUA**



**Hj. TUTIEK MASRIA WIDYO, SE
WAKIL KETUA**



**JANU ISMADI, SE
WAKIL KETUA**

D A F T A R I S I

| | Halaman |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Nota Kesepakatan | i |
| Daftar Isi | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tujuan | 4 |
| C. Dasar Hukum | 5 |
| D. Sistematika | 7 |
| BAB II KERANGKA EKONOMI DAERAH | |
| A. Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2010 dan Tahun 2011 | 8 |
| 1. Pertumbuhan Ekonomi | 8 |
| 2. Inflasi | 13 |
| 3. Investasi | 13 |
| 4. Ketenagakerjaan | 14 |
| 5. Kemiskinan | 15 |
| B. Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2013 | 16 |
| 1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi | 16 |
| 2. Pergerakan Inflasi | 19 |
| 3. Investasi | 19 |
| 4. Ketenagakerjaan | 21 |
| 5. Kemiskinan | 22 |
| BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD | |
| A. Asumsi Dasar yang digunakan APBN | 23 |
| B. Asumsi Dasar yang digunakan APBD | 26 |
| BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH | |
| A. Pendapatan Daerah | 28 |
| 1. Kebijakan Pendapatan Daerah | 28 |
| 2. Target Pendapatan Daerah | 28 |
| 3. Upaya Pencapaian Target | 32 |

| | | |
|--------------|----------------------------------|-----------|
| B. | Belanja Daerah | 33 |
| 1. | Kebijakan Belanja Daerah | 33 |
| 2. | Kebijakan Belanja Tidak Langsung | 34 |
| 3. | Kebijakan Belanja Langsung | 35 |
| C. | Pembiayaan Daerah | 51 |
| 1. | Kebijakan Penerimaan Pembiayaan | 51 |
| 2. | Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan | 52 |
| BAB V | PENUTUP | 55 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan bahwa Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. RKPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2012. RKPD merupakan rencana kerja tahunan daerah yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut setiap pemerintah daerah wajib untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengamanatkan bahwa SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah. Oleh sebab itu diperlukan peran serta masyarakat dalam perencanaan yang dilaksanakan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Forum tersebut akan menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana program dan kegiatan Tahun 2013 merupakan implementasi tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pembangunan Daerah (RPJMD) 2009-2013 yang memuat visi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu “Pemerintah Daerah Yang Katalistik Dan Masyarakat Mandiri Yang Berbasis Keunggulan Daerah Serta Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas Unggul dan Beretika”. Visi tersebut ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut: 1) Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung; 2) Memperkuat fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis

pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera; 3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis *Good Governance*; dan 4) Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

Visi dan misi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan nasional serta kabupaten dan kota serta merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena itu, sinergitas dan konsistensi kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses kebijakan pembangunan di daerah.

Penyusunan KUA merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian lebih teknis dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam KUA, yang merupakan implementasi dari RKPD, dengan sumber penganggaran dari dana APBD Provinsi sebagai acuan dalam penyusunan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Kebijakan Umum APBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi perencanaan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Penetapan prioritas pembangunan Tahun 2013 didasarkan atas pertimbangan: (1) memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, (2) mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan, (3) merupakan tugas pemerintah sebagai pelaku utama, dan (4) realistis untuk dilaksanakan. Strategi pelaksanaan pembangunan tahun 2013, dalam rangka memberdayakan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, telah ditetapkan tema pembangunan yaitu “Penguatan Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”. Tema pembangunan tersebut juga selaras dengan isu strategis pembangunan DIY Tahun 2013, yaitu: 1) tingginya kemiskinan dan pengangguran di pedesaan dan perkotaan; 2) kurangnya sarana prasarana pendukung keterkaitan antar wilayah; 3) belum optimalnya pengembangan potensi sumberdaya alam untuk menopang ketahanan pangan dan energi; 4) terbatasnya kapasitas aparat pemerintah dalam tata kelola pemerintahan

yang baik; dan 5) tingginya ancaman bencana alam dan menurunnya daya dukung lingkungan.

Penyusunan KUA Tahun 2013, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilengkapi oleh Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Kebijakan Umum APBD juga memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, hal tersebut disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kebijakan Umum APBD Tahun 2013 yang juga merupakan kebijakan politik pemerintah daerah dirumuskan dengan maksud agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika pembangunan pemerintah pusat dan daerah sehingga dapat mempertahankan sinergitas pencapaian tujuan pembangunan pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menjadi indikator kinerja yang akan digunakan dalam menilai efektivitas pelaksanaannya selama kurun waktu satu tahun ke depan.

Sinkronisasi RKPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan KUA Tahun 2013 dilakukan melalui pengintegrasian antara program dan kegiatan menurut RKPD yang berbasis RPJMD dengan klasifikasi urusan-urusan pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya KUA Tahun 2013 merupakan dasar dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2013 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) tahun anggaran 2013 di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyelenggarakan pembangunan selama satu tahun anggaran, yang disusun mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat dan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang pada RKPD Tahun 2013, yang secara keseluruhan merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan hal tersebut diatas, KUA Tahun 2013 memuat tentang target pencapaian kinerja dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dana penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya yang akan ditempuh pada Tahun 2013 mendatang.

Di sisi lain, guna menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan jangka panjang yang dicita-citakan oleh seluruh stakeholders pembangunan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka proses penyusunan KUA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 tetap mengacu pada RKPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dan juga kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam proses perencanaan pembangunan tahunan yaitu harus mengakomodir kepentingan dan keterkaitannya dengan proses penganggaran daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. PP nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan RKPD sejalan dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD. Berdasarkan dokumen tersebut nantinya akan dihasilkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Bentuk proses perencanaan pembangunan dengan penganggaran daerah juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

B. TUJUAN

Tujuan disusunnya KUA Tahun 2013 adalah tersedianya dokumen perencanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2013, untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2013. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Provinsi DIY dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2013.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 14);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 30);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 63);

17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 26).

D. SISTEMATIKA

Kebijakan Umum APBD Provinsi DIY Tahun 2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan KUA Tahun 2013.
2. Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah
Menguraikan perkembangan kondisi ekonomi makro daerah Tahun 2010 dan Tahun 2011 serta perkiraan Tahun 2013.
3. Bab III Asumsi-Asumsi Dasar dalam Penyusunan RAPBD
Menguraikan asumsi dasar yang digunakan RAPBN dan RAPBD.
4. Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Menguraikan hal-hal sebagai berikut:
 - Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada Tahun 2013.
 - Belanja Daerah, meliputi kebijakan belanja daerah, kebijakan belanja tidak langsung dan langsung.
 - Pembiayaan Daerah, meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan.
5. Bab V Penutup

BAB II

KERANGKA EKONOMI DAERAH

A. KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH TAHUN 2010 DAN TAHUN 2011

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi DIY pada Tahun 2011 tumbuh sedikit lebih cepat karena krisis global mulai dapat teratasi sehingga permintaan dari pasar internasional membaik dan membawa dampak positif bagi perekonomian nasional. Dampak positif dari perekonomian global dan nasional juga akan tercermin pada laju pertumbuhan ekonomi DIY. Geliat aktivitas pasca merapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan terdapatnya bantuan fisik (rehabilitasi-rekonstruksi) dan pemulihan investasi. Program-program tersebut membawa sentimen positif terhadap perkembangan perekonomian di DIY, seperti berkembangnya sektor perdagangan, hotel, dan pariwisata.

Tabel 2.1
Nilai PDRB Provinsi DIY menurut Lapangan Usaha
Tahun 2010 dan 2011

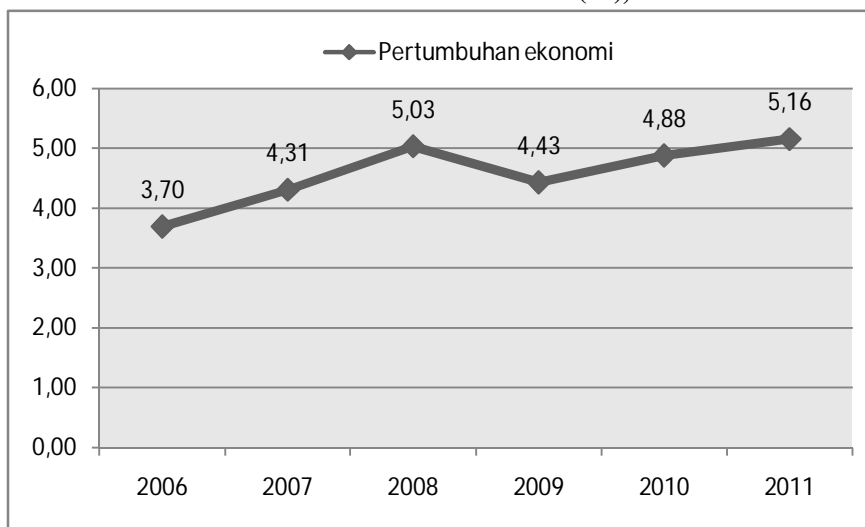
| Lapangan Usaha | | Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rp) | | Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Milyar Rp) | |
|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pertanian | 6.644,69 | 7.370,79 | 3.632,68 | 3.555,80 |
| 2. | Pertambangan & Penggalian | 304,66 | 361,79 | 139,97 | 156,71 |
| 3. | Industri Pengolahan | 6.396,64 | 7.434,02 | 2.793,58 | 2.983,17 |
| 4. | Listrik, Gas & Air bersih | 607,07 | 675,91 | 193,03 | 201,24 |
| 5. | Konstruksi | 4.833,42 | 5.580,60 | 2.040,31 | 2.187,80 |
| 6. | Perdagangan, Hotel & Restoran | 9.008,18 | 10.246,58 | 4.383,85 | 4.611,40 |
| 7. | Pengangkutan & Komunikasi | 4.119,97 | 4.572,93 | 2.250,66 | 2.430,70 |
| 8. | Keuangan, Real Estate, & Jasa Perusahaan | 4.552,67 | 5.158,23 | 2.024,37 | 2.185,22 |
| 9. | Jasa-jasa | 9.158,28 | 10.381,24 | 3.585,60 | 3.817,67 |
| PDRB | | 45.625,58 | 51.782,09 | 21.044,05 | 22.129,71 |

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2012

Perekonomian Provinsi DIY pada Tahun 2011 mengalami pertumbuhan sebesar 5,16% dibandingkan Tahun 2010. Nilai PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2010 sebesar 21,044 trilyun rupiah mengalami kenaikan pada Tahun 2011 menjadi sebesar 22,129 trilyun rupiah. Apabila dilihat berdasarkan harga berlaku, PDRB Tahun 2011 naik sebesar 6,156 trilyun rupiah, dari sebesar 45,625 trilyun rupiah Tahun 2010 menjadi sebesar 51,782 trilyun rupiah.

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY pada Tahun 2010 mencapai 4,88%, naik 0,45 poin dibanding dengan laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2009 yang sebesar 4,43%. Kemudian pada Tahun 2011, perekonomian Provinsi DIY kembali mengalami pertumbuhan sebesar 5,16%. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian DIY semakin membaik.

Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DIY (%), 2006-2011

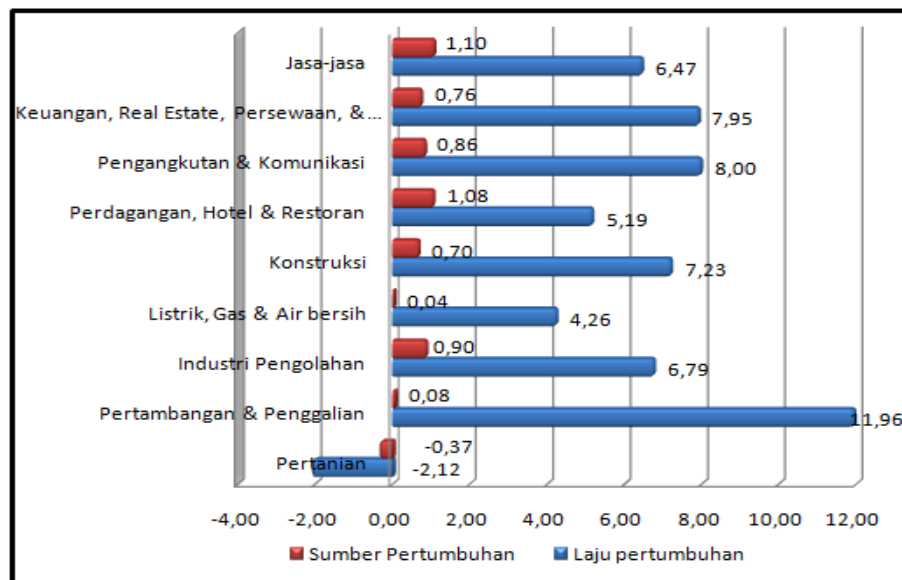


Sumber: BPS Provinsi DIY

Selama Tahun 2011, hampir semua sektor ekonomi yang membentuk PDRB mengalami pertumbuhan, kecuali sektor pertanian yang berkontraksi sebesar -2,12%. Pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 11,96% diikuti oleh sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 8,00%; Real Estate, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 7,95%; sektor Konstruksi 7,23%; sektor Industri Pengolahan sebesar 6,79%; sektor Jasa-Jasa sebesar 6,47%; sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 5,19%; dan sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih sebesar 4,26%.

Besarnya sumbangan masing-masing sektor dalam menciptakan laju pertumbuhan ekonomi didominasi oleh sektor-sektor yang memiliki nilai nominal besar, meskipun pertumbuhan sektor yang bersangkutan relatif kecil. Sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan tertinggi 11,96%, tetapi hanya memberikan kontribusi sebesar 0,08% terhadap total pertumbuhan DIY. Sementara sektor jasa-jasa yang tumbuh lebih rendah, yaitu sebesar 6,47% menyumbang 1,10% terhadap pertumbuhan DIY. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,19% menyumbang 1,08%. Sektor Industri Pengolahan dengan pertumbuhan 6,79% menyumbang 0,90%. Serta sektor Pengangkutan dan Komunikasi tumbuh sebesar 8,00% memberi andil 0,86% terhadap pertumbuhan DIY.

Gambar 2.2
Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga konstan 2000 (%)
Provinsi DIY, 2011



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2012

Kontribusi tertinggi dalam pembentukan PDRB Provinsi DIY Tahun 2011 berasal dari sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 20,84%, diikuti sektor Jasa-Jasa sebesar 17,25%; sektor Pertanian sebesar 16,07%; sektor Industri Pengolahan sebesar 13,48%; sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 10,98%, sektor Konstruksi sebesar 9,89%; sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan sebesar 9,87%; dan sektor Listrik, Gas dan Air Bersih memberikan kontribusi 0,91%, sedangkan kontribusi terendah berasal dari sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,71%.

Sementara itu, jika dibandingkan besarnya kontribusi sektor dalam PDRB tersebut pada Tahun 2011 terhadap Tahun 2010, maka terlihat hampir semua sektor mengalami peningkatan, kecuali sektor Pertanian dan sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih yang mengalami penurunan. Sektor Pertanian Tahun 2010 sebesar 17,26% turun menjadi 16,07% Tahun 2011, sedangkan sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih Tahun 2010 sebesar 0,92% turun menjadi 0,91% Tahun 2011.

Tabel 2.2
Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Provinsi DIY, 2010-2011

| Sektor | 2010 (%) | 2011 (%) |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. Pertanian | 17,26 | 16,07 |
| 2. Pertambangan & Penggalian | 0,67 | 0,71 |
| 3. Industri Pengolahan | 13,27 | 13,48 |
| 4. Listrik, Gas & Air bersih | 0,92 | 0,91 |
| 5. Konstruksi | 9,70 | 9,89 |
| 6. Perdagangan, Hotel & Restoran | 20,83 | 20,84 |
| 7. Pengangkutan & Komunikasi | 10,70 | 10,98 |
| 8. Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan | 9,62 | 9,87 |
| 9. Jasa-jasa | 17,04 | 17,25 |
| PDRB | 100 | 100 |

Sumber: BPS Provinsi DIY

Pada sisi penggunaan, PDRB dirinci menurut komponen-komponen pengeluaran antara lain Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan komponen lainnya (gabungan dari ekspor, impor, konsumsi lembaga nirlaba, perubahan inventori, dan diskrepansi statistik).

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2011 sebesar 51,782 triliun rupiah yang sebagian besar digunakan untuk Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 26,319 triliun rupiah, komponen PMTB sebesar 16,459 triliun rupiah, dan komponen Konsumsi Pemerintah sebesar 13,056 triliun rupiah.

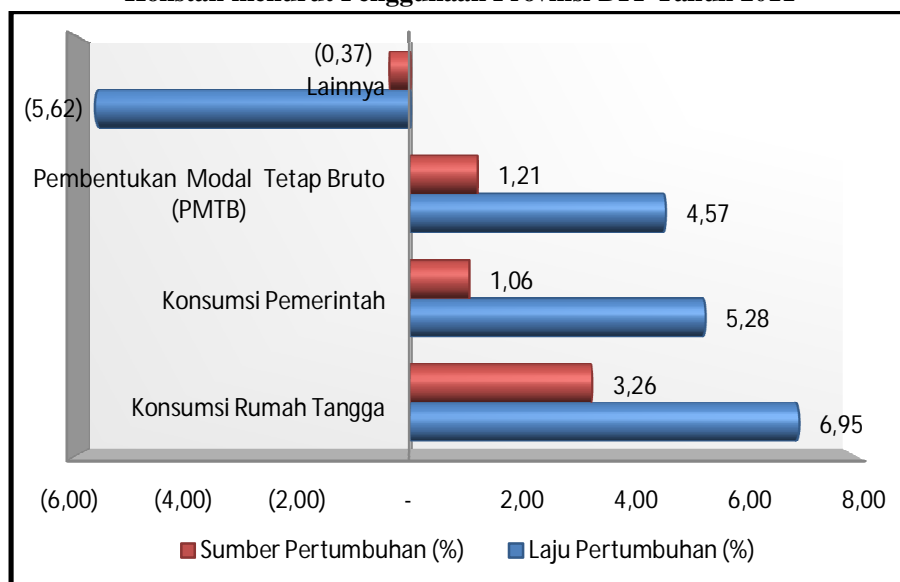
Tabel 2.3
Nilai PDRB Provinsi DIY menurut Penggunaan
Tahun 2010 dan 2011

| Jenis Penggunaan | | Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rp) | | Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Miliar Rp) | |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Konsumsi Rumah Tangga | 23.198,86 | 26.319,64 | 9.881,63 | 10.568,42 |
| 2. | Konsumsi Pemerintah | 11.709,93 | 13.056,33 | 4.215,31 | 4.437,72 |
| 3. | Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) | 15.027,84 | 16.459,38 | 5.561,44 | 5.815,81 |
| 4. | Lainnya | (4.311,04) | (4.053,26) | 1.385,66 | 1.307,76 |
| PDRB | | 45.625,59 | 51.782,09 | 21.044,04 | 22.129,71 |

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2012

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY Tahun 2011 sebesar 5,16% didukung oleh semua komponen penggunaan, yaitu Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 6,95%, Konsumsi Pemerintah tumbuh 5,28% dan PMTB tumbuh 4,57%. Sumber utama pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi rumah tangga 3,26%, diikuti PMTB 1,21% serta konsumsi pemerintah 1,06%.

Gambar 2.3 Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Penggunaan Provinsi DIY Tahun 2011



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2012

2. Inflasi

Tingkat inflasi di Provinsi DIY pada Tahun 2010 mencapai 7,38%. Tingkat inflasi ini lebih tinggi jika dibandingkan tingkat inflasi pada Tahun 2009 sebesar 2,93%. Peningkatan inflasi yang cukup tajam ini diperkirakan akibat dampak kebijakan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan LPG. Kedua komoditas tersebut mempunyai efek pengganda yang tinggi karena TDL yang dinaikkan mulai dari listrik rumah tangga berkapasitas 1300 VA dan gas kapasitas 12 kg. Komoditas tersebut mempunyai pangsa konsumen yang sangat besar di Provinsi DIY, bukan hanya untuk kepentingan rumah tangga tetapi juga industri kecil menengah yang banyak berkembang di Provinsi DIY. Selain itu, bencana erupsi Gunung Merapi mengakibatkan pasokan hasil pertanian dan perdagangan terganggu dan memicu kenaikan harga pangan. Gejolak harga di kelompok bahan makanan sebagai akibat anomali musim pada Tahun 2010 juga menjadi pemicu utama terjadinya inflasi DIY hingga mencapai 7,38%. Namun demikian, Tahun 2011 inflasi mengalami penurunan menjadi 3,88%.

Tabel 2.4
Laju Inflasi Provinsi DIY, 2010- 2011

| Tahun | Inflasi (%) |
|--------------|--------------------|
| 2010 | 7,38 |
| 2011 | 3,88 |

Sumber: BPS Provinsi DIY

3. Investasi

Pada Tahun 2010 angka ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) Provinsi DIY berada pada angka 6,50 yang artinya untuk menambah 1 juta rupiah output diperlukan investasi sebesar 6,50 juta rupiah. Angka ICOR tersebut Tahun 2011 turun menjadi sebesar 5,98. Hal ini berarti tingkat produktifitas investasi dan perekonomian di DIY meningkat, dimana ICOR yang lebih rendah menunjukkan adanya percepatan pertumbuhan ekonomi. Pada Tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY tercatat sebesar 5,16%, dengan nilai investasi atas dasar harga berlaku sebesar 17,318 trilyun rupiah meningkat dari Tahun 2010 yang sebesar 4,88% dengan investasi sebesar 15,851 trilyun rupiah.

Tabel 2.5
Perkembangan ICOR Provinsi DIY, 2010-2011

| Tahun | PDRB (juta Rp) | | Investasi (juta Rp) | | Persentase Investasi terhadap PDRB | Pertumbuhan Ekonomi | ICOR |
|--------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------|------|
| | ADH Berlaku | ADH Konstan | ADH Berlaku | ADH Konstan | | | |
| 2010 | 45.625.589 | 21.044.042 | 15.851.530 | 6.372.836 | 34,74 | 4,88 | 6,50 |
| 2011 ^{*)} | 51.782.092 | 22.129.707 | 17.318.572 | 6.493.831 | 33,45 | 5,16 | 5,98 |

Catatan: Investasi = PMTB + Perubahan Inventory

*Angka sementara

Sumber: BPS Provinsi DIY

4. Ketenagakerjaan

Jumlah Angkatan kerja penduduk berusia 15 tahun keatas Tahun 2010 sebanyak 1.882.296 jiwa. Pada Tahun 2011, jumlah ini turun 9.384 jiwa menjadi 1.872.912 jiwa. Penduduk yang bukan angkatan kerja pada Tahun 2010 sebanyak 815.838 jiwa, dan pada Tahun 2011 meningkat menjadi 850.717 jiwa.

Tabel 2.6
**Penduduk Berusia 15 Tahun keatas menurut Kegiatan
Provinsi DIY, 2010-2011**

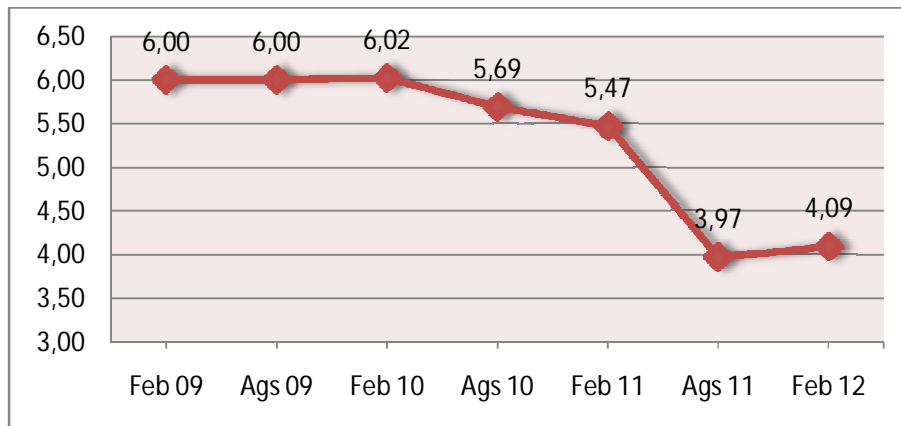
| Uraian | 2010 (Agustus) | 2011 (Agustus) |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Angkatan Kerja | 1.882.296 | 1.872.912 |
| Bekerja | 1.775.148 | 1.798.595 |
| Pengangguran | 107.148 | 74.317 |
| Bukan Angkatan Kerja | 815.838 | 850.717 |
| Sekolah | 279.420 | 282.226 |
| Mengurus Rumah Tangga | 437.630 | 429.555 |
| Lainnya | 98.788 | 138.936 |
| Jumlah | 2.698.134 | 2.723.629 |

Sumber : DIY Dalam Angka 2011, BPS Provinsi DIY

Jumlah angkatan kerja Tahun 2011 sebanyak 1.872.912 jiwa terdiri dari penduduk yang bekerja sebanyak 1.798.595 jiwa dan pengangguran sebanyak 74.317 jiwa. Jumlah penduduk yang bukan angkatan kerja pada periode yang sama sebanyak 850.717 jiwa (sekolah 282.226 jiwa; mengurus rumah tangga 429.555 jiwa; dan lainnya 138.936 jiwa).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan angkatan kerja. TPT dapat digunakan untuk melihat perkembangan pengangguran. Fluktuasi TPT di Provinsi DIY dari Tahun 2009 hingga 2012 berada pada kisaran 4-6%, dengan kecenderungan menurun. Pada Februari 2009 TPT tercatat sebesar 6,00%; Februari 2010 naik menjadi 6,02%; kemudian turun pada Februari 2011 menjadi 5,47% dan Februari 2012 menjadi 4,09%.

**Gambar 2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DIY (%)
Februari 2009-Februari 2012**



Sumber: BPS Provinsi DIY

5. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY pada Tahun 2011 sebanyak 560,88 ribu jiwa atau sebesar 16,08% dari total penduduk DIY. Jumlah penduduk miskin di DIY pada Tahun 2011 tersebut mengalami penurunan sebesar 0,75% dari Tahun 2010 yang sebesar 16,83%. Jumlah penduduk miskin di wilayah kota Tahun 2011 tercatat sebanyak 304,34 ribu jiwa, sedangkan penduduk miskin di wilayah desa sebanyak 256,55 ribu jiwa.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Miskin menurut Kota/Desa
di Provinsi DIY, 2010-2011

| Tahun | Kota/Urban jiwa (000) | Desa/Rural jiwa (000) | Jumlah | |
|-------|--------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------------|
| | | | Jiwa (000) | Persentase terhadap penduduk Provinsi |
| 2010 | 308,36 | 268,94 | 577,30 | 16,83 |
| 2011 | 304,34 | 256,55 | 560,88 | 16,08 |

Sumber: BPS Provinsi DIY

B. PROYEKSI EKONOMI MAKRO DAERAH TAHUN 2013

1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi DIY pada Tahun 2012 diperkirakan berada pada kisaran 5,2-5,4%, sedangkan pada Tahun 2013 diperkirakan berkisar antara 5,1-5,3%. Tahun 2012 diperkirakan perekonomian DIY tetap tumbuh positif meskipun hanya meningkat dibawah 1% dibandingkan angka pertumbuhan Tahun 2011. Proyeksi pertumbuhan ekonomi DIY Tahun 2012 yang diperkirakan lebih baik dibandingkan 2011 didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu: *pertama*, adanya kebijakan antisipasi dampak krisis keuangan global terhadap perekonomian; *kedua*, ketersediaan dan permintaan barang/jasa cenderung stabil (terutama kenaikan permintaan internasional karena perekonomian global membaik); *ketiga*, proses politik lokal dan nasional tidak mengganggu kegiatan ekonomi (stabilitas politik dan keamanan). Sementara pada Tahun 2013 perekonomian diperkirakan mengalami perlambatan sebagai dampak krisis global dan stabilitas sosial politik di Indonesia.

Tabel 2.8
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DIY, 2012-2013

| Tahun | Pertumbuhan (%) | |
|-------|-----------------|---------|
| | Moderat | Optimis |
| 2012 | 5,2 | 5,4 |
| 2013 | 5,1 | 5,3 |

Sumber: Analisis Makro Ekonomi, Bappeda Provinsi DIY

Pengaruh krisis global yang terjadi di Eropa masih dirasakan Indonesia hingga Tahun 2012 ini. Bank Indonesia (BI) mencatat kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) sepanjang kuartal I tahun ini mencatatkan defisit sebesar US\$1 miliar. Neraca pembayaran yang masih defisit pada awal tahun ini disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah meningkatnya permintaan domestik, terutama untuk kebutuhan investasi. Peningkatan permintaan domestik tersebut menyebabkan impor masih tumbuh relatif tinggi. Selain itu, permintaan global terhadap komoditas ekspor Indonesia melemah dan harga komoditas nonmigas menurun lebih dalam.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis nilai ekspor Indonesia pada Mei 2012 mengalami penurunan 8,55 % dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya ekspor nonmigas sebesar 7,72 % dan ekspor migas sebesar 11,41 %. Di sisi lain, laju impor justru meningkat. Impor naik sepanjang April sebesar 11,65 % dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Hingga akhir April 2012, nilai impor telah menyentuh US\$ 16,62 miliar. Sedangkan pada April tahun lalu, impor sebesar US\$ 14,89 miliar.

Tingginya penurunan ekspor nonmigas nasional juga dialami oleh DIY. Pada Mei 2012, volume ekspor DIY tercatat terjadi penurunan sebesar 31,52% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan volume ini disebabkan anjloknya ekspor komoditi furnitur ke pasar Eropa dan Amerika. Selama ini ekspor komoditas DIY sebagian besar ke negara-negara tersebut yang kini masih dilanda krisis ekonomi. Pada Tahun 2006 hingga 2010, mata dagangan dari DIY antara 30 hingga 33 persen masuk ke pasar Eropa, dan 42 hingga 45 persen ke pasar Amerika. Dari sisi nilai, penurunan ekspor terbesar dialami oleh komoditas kerajinan yang mencapai sekitar 30%. Kondisi penurunan ekspor yang cukup signifikan ini diperkirakan akan berdampak hingga Tahun 2013, sehingga proyeksi angka pertumbuhan akan melambat.

Pada tahun 2012, nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 berdasarkan lapangan usaha di Provinsi DIY diperkirakan mencapai kisaran 23.243.291 juta rupiah hingga 23.354.016 juta rupiah dengan pertumbuhan PDRB sebesar 5,20-5,40%. Sedangkan Tahun 2013 diperkirakan berkisar antara 24,428 trilyun rupiah hingga 24,591 trilyun rupiah dengan pertumbuhan diperkirakan berkisar antara 5,10-5,30%.

Tabel 2.9
Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha
Provinsi DIY, 2012-2013 (Juta Rupiah)

| Lapangan Usaha | 2012 | | 2013 | |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2012m | 2012o | 2013m | 2013o |
| 1. Pertanian | 3.904.873 | 3.923.475 | 3.979.435 | 4.006.001 |
| 2. Pertambangan & Penggalian | 146.433 | 147.130 | 153.901 | 154.928 |
| 3. Industri Pengolahan | 3.109.952 | 3.124.767 | 3.075.573 | 3.096.105 |
| 4. Listrik, Gas & Air Bersih | 202.217 | 203.180 | 227.187 | 228.704 |
| 5. Bangunan | 2.266.221 | 2.277.017 | 2.545.470 | 2.562.463 |
| 6. Perdagangan, Hotel & Restoran | 4.850.875 | 4.873.983 | 5.142.241 | 5.176.569 |
| 7. Pengangkutan & Komunikasi | 2.496.330 | 2.508.221 | 2.687.157 | 2.705.096 |
| 8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan | 2.291.789 | 2.302.706 | 2.450.199 | 2.466.555 |
| 9. Jasa-jasa | 3.974.603 | 3.993.537 | 4.167.536 | 4.195.357 |
| PDRB | 23.243.291 | 23.354.016 | 24.428.699 | 24.591.779 |
| Pertumbuhan PDRB (%) | 5,20 | 5,40 | 5,10 | 5,30 |

Sumber: Analisis Makro Ekonomi, Bappeda Provinsi DIY

Keterangan: “m” = moderat dan “o” = optimis

Menurut proyeksi, nilai PDRB Provinsi DIY berdasarkan Penggunaan Tahun 2012 sebesar 23,243 trilyun rupiah hingga 23,354 trilyun rupiah yang terdiri dari penggunaan Konsumsi Rumah Tangga diperkirakan sebesar 10,984 trilyun rupiah hingga 11,037 trilyun rupiah, penggunaan Konsumsi Pemerintah sebesar 4,720 trilyun rupiah hingga 4,743 trilyun rupiah, penggunaan PMTB sebesar 6,078 trilyun rupiah hingga 6,107 trilyun rupiah, dan untuk penggunaan lainnya sebesar 1,459 trilyun rupiah hingga 1,466 trilyun rupiah.

Sementara itu, Tahun 2013 nilai PDRB diperkirakan sebesar 24,428 trilyun rupiah hingga 24,591 trilyun rupiah dimana penggunaan Konsumsi Rumah Tangga diperkirakan sebesar 11,562 trilyun rupiah hingga 11,639 trilyun rupiah, penggunaan Konsumsi Pemerintah sebesar 4,976 trilyun rupiah hingga 5,009 trilyun rupiah, penggunaan PMTB sebesar 6,412 trilyun rupiah hingga 6,455 trilyun rupiah, dan untuk penggunaan lainnya sebesar 1,477 trilyun rupiah hingga 1,487 trilyun rupiah.

Tabel 2.10
Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Penggunaan
Provinsi DIY, 2012-2013 (juta rupiah)

| Jenis Penggunaan | 2012 | | 2013 | |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | m | o | m | o |
| 1. Konsumsi Rumah Tangga | 10.984.780 | 11.037.108 | 11.562.103 | 11.639.289 |
| 2. Konsumsi Pemerintah | 4.720.712 | 4.743.201 | 4.976.126 | 5.009.345 |
| 3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto | 6.078.121 | 6.107.075 | 6.412.534 | 6.455.342 |
| 4. Lainnya | 1.459.679 | 1.466.632 | 1.477.936 | 1.487.803 |
| PDRB | 23.243.291 | 23.354.016 | 24.428.699 | 24.591.779 |
| Pertumbuhan PDRB (%) | 5.20 | 5.40 | 5.10 | 5.30 |

Sumber: Analisis Makro Ekonomi, Bappeda Provinsi DIY

Keterangan: “m” = moderat dan “o” = optimis

Sektor konsumsi masyarakat masih menjadi sektor utama dalam menggerakkan perekonomian DIY baik dari sisi pertumbuhan maupun andil dalam pembentukan PDRB. Tingginya tingkat konsumsi masyarakat menunjukkan daya beli yang tinggi. Hal ini akan berdampak positif jika permintaan domestik masyarakat DIY tersebut dapat dipenuhi oleh produsen lokal sehingga mendorong kegiatan investasi.

2. Pergerakan Inflasi

Proyeksi inflasi DIY untuk Tahun 2012 dan 2013 masing-masing sebesar 4,00% dan 5,20%. Inflasi yang rendah diperkirakan terjadi karena pemerintah mampu menjaga stok kebutuhan bahan pangan dan barang konsumsi lainnya melalui pemberdayaan kemampuan lokal maupun kegiatan impor. Kenaikan di Tahun 2012 diperkirakan akan terjadi karena peningkatan konsumsi pemerintah yang cukup signifikan terkait dengan persiapan pemilu pada Tahun 2014, dan dampak harga pangan dunia yang diperkirakan terus meningkat.

Beberapa faktor yang kemungkinan dapat mendorong inflasi di tahun mendatang antara lain adalah masih terus meningkatnya harga pangan di pasar internasional terkait dengan iklim, tingginya harga minyak dunia yang nantinya dapat menyebabkan kian tingginya subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah dan pada akhirnya dapat memaksa pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, dan ekspektasi inflasi terkait cukup tingginya capaian inflasi pada tahun sebelumnya.

Tabel 2.11
Poyeksi Inflasi Provinsi DIY (%), 2012-2013

| Tahun | Range Angka Proyeksi | Proyeksi Angka Moderat |
|-------|----------------------|------------------------|
| 2012 | 3,90-4,30 | 4,00 |
| 2013 | 5,10-5,60 | 5,20 |

Ket: diasumsikan inflasi Kota Yogyakarta dapat mewakili Prov. DIY

Sumber: Makro Ekonomi Provinsi DIY Tahun 2011-2013, Bappeda Provinsi DIY

3. Investasi

Angka ICOR DIY Tahun 2012 diperkirakan meningkat mencapai 5,15(m)-5,00(o) dan Tahun 2013 kembali turun menjadi 5,00(m)-4,80(o). Kenaikkan ICOR di Tahun 2012 diperkirakan karena dampak krisis global mempengaruhi kegiatan ekonomi dan efektivitas investasi.

Angka-angka ini menunjukkan jika semakin kecil ICOR yang dimiliki oleh suatu perekonomian berarti semakin besar produktifitasnya. Konsekuensinya adalah dengan tingkat investasi yang sama akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang semakin besar. Dengan semakin rendahnya tingkat ICOR, maka pemanfaatan ketersediaan investasi untuk meningkatkan *output* perekonomian dapat dioptimalkan. Harapan lebih jauh dari kondisi ini pergerakan perekonomian yang semakin agresif terutama untuk pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Kegiatan investasi akan berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat jika dilakukan pada bidang yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Proyeksi nilai ICOR pada Tahun 2013 bisa menurun dengan asumsi beberapa rencana investasi dapat terealisasi. Salah satunya adalah rencana pembangunan bandara internasional di Kulon Progo, yang akan dilaksanakan pemerintah di awal Tahun 2013 dan diperkirakan selesai Tahun 2016. Investasi besar ini akan mendorong investasi infrastruktur lainnya seperti pelebaran jalan ke bandara hingga empat jalur dengan lebar minimal 14 meter, akses kereta api dan monorail ke bandara, dan pembangunan jalan tol dari bandara ke Kota Yogyakarta.

Optimisme investasi di Provinsi DIY juga didukung oleh iklim investasi yang mendukung. Kota Yogyakarta sebagai bagian dari wilayah DIY selama 3 tahun terakhir menyandang predikat kota yang ramah terhadap investor. Hal ini akan semakin menarik minat investor untuk berinvestasi di DIY. Menurut Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM), DIY mencatat realisasi investasi sepanjang Tahun 2011 mencapai Rp 7,75 triliun atau naik 50 % dibandingkan Tahun 2010 sebesar Rp 4,5 triliun. Kenaikan ini lebih banyak didorong oleh sektor jasa perhotelan. Sektor pendorong lainnya adalah industri seperti pabrik tekstil dan sarung tangan yang melakukan ekspansi bisnis.

Proyeksi angka ICOR Provinsi DIY diatas diharapkan dapat berdampak langsung terhadap perkembangan perekonomian DIY ke arah yang lebih baik. Ini disebabkan semakin membaiknya/mengecilnya nilai ICOR diharapkan akan mampu meningkatkan kapasitas produksi perekonomian daerah (PDRB) sehingga target-target makroekonomi yang dirumuskan dapat tercapai. Pencapaian target-target makroekonomi ini akan bermanfaat dalam pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dicerminkan salah satunya oleh pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Tabel 2.12
Proyeksi ICOR Provinsi DIY Tahun 2012-2013

| Tahun | ICOR |
|--------------|-------------|
| 2012m | 5.15 |
| 2012o | 5.00 |
| 2013m | 5.00 |
| 2013o | 4.80 |

Sumber: Makro Ekonomi Provinsi DIY Tahun 2011-2013, Bappeda Provinsi DIY

4. Ketenagakerjaan

Kondisi angkatan kerja Provinsi DIY pada Tahun 2012 diperkirakan sebanyak 2,167 juta jiwa dan Tahun 2013 diperkirakan meningkat menjadi sebanyak 2,212 juta jiwa. Kondisi pengangguran terbuka Provinsi DIY pada Tahun 2012 sebanyak 135.443 jiwa dan Tahun 2013 sebanyak 139.047 jiwa atau 6,25% dan 6,28%. Angka proyeksi 2013 masih lebih tinggi dari angka proyeksi pengangguran nasional sebesar 5,8% hingga 6,1%.

Tabel 2.13
Proyeksi Penduduk Berusia 15 Tahun keatas menurut Kegiatan
Provinsi DIY, 2012–2013

| Tenaga Kerja | 2012 | 2013 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <i>Angkatan Kerja</i> | <i>2.167.282</i> | <i>2.212.871</i> |
| Bekerja | 2.031.839 | 2.073.824 |
| Pengangguran Terbuka | 135.443 | 139.047 |
| Pengangguran Terbuka (%)* | 6,25 | 6,28 |

*Rasio Pengangguran terhadap angkatan kerja

Sumber: Makro Ekonomi Provinsi DIY Tahun 2011-2013, Bappeda Provinsi DIY

Proyeksi ini mempertimbangkan perkembangan yang terjadi di tingkat nasional dan kondisi DIY di tahun-tahun sebelumnya. Di tingkat nasional, Bappenas memperkirakan pada Tahun 2013 penyerapan tenaga kerja lewat pertumbuhan ekonomi akan menurun dibanding Tahun 2011 dan 2012. Elastisitas pekerja 350.000 orang per 1% pertumbuhan ekonomi dan sudah memperhitungkan perlambatan global yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Saat ekspor melambat, pertumbuhan ekonomi akan tetap mengupayakan penciptaan kesempatan kerja yang fokus pada penguatan perekonomian domestik dan investasi. Selain itu, pengeluaran pemerintah diharapkan dapat mendorong perekonomian. Sementara itu untuk kondisi internal DIY, perlambatan ekspor yang mengancam kebangkrutan pengusaha kerajinan dan produk nonmigas lainnya menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran terbuka.

5. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin pada Tahun 2012 diproyeksikan sebanyak 553.589 jiwa dan diproyeksikan turun sebanyak 14.671 jiwa atau sebesar 2,65% pada Tahun 2013 menjadi sebanyak 538.918 jiwa. Di tengah pengaruh krisis global yang mengancam keberlangsungan usaha sektor penopang hidup rakyat banyak, maka proyeksi penurunan jumlah orang miskin di DIY masih berada di bawah angka 3%. Meskipun demikian, Tahun 2013 penurunan jumlah penduduk miskin lebih tinggi dari tahun 2012. Asumsinya adalah pemerintah provinsi mampu memanfaatkan peluang dari kebijakan pusat terkait dengan perluasan kesempatan kerja. Pada 2013 pemerintah pusat mengupayakan terciptanya 2,7 juta lapangan kerja baru. Kebijakan penurunan pengangguran yang akan dilaksanakan pemerintah diarahkan untuk menyerap angkatan kerja muda. Program-program pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja, antara lain membuka akses pemagangan, dan memberikan kesempatan bagi masyarakat usia muda yang putus sekolah. Selain itu pemerintah juga menitikberatkan pembukaan lapangan kerja di sektor industri.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, pemerintah DIY perlu mengantisipasi penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor industri akibat penurunan komoditas ekspor. Mengingat sektor ini banyak menyelamatkan penduduk miskin dari kemiskinan yang bertambah parah. Selain prioritas pada sektor tertentu, pengentasan kemiskinan juga harus disesuaikan dengan potensi lokal dan lintas sektoral yang berbasis di tingkat kecamatan. Pengentasan kemiskinan dengan memperhatikan kondisi dan potensi lokal akan lebih fokus sehingga diharapkan lebih tepat sasaran. Pemilihan 20 kecamatan sasaran di 5 kabupaten/kota se Provinsi DIY merupakan upaya yang diyakini lebih efektif menurunkan tingkat kemiskinan dibanding angka proyeksi penurunan dengan data BPS seperti dalam Tabel 2.14, bahkan lebih luas lagi dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi DIY, 2010-2013

| Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) | Penurunan (jiwa) | Persentase Penurunan (%) |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 2010 | 577.300 | 8.480 | 1,45 |
| 2011 | 560.880 | 16.420 | 2,84 |
| 2012* | 553.589 | 7.291 | 1,30 |
| 2013* | 538.918 | 14.671 | 2,65 |

*hasil analisis/perkiraan

Sumber: Makro Ekonomi Provinsi DIY Tahun 2011-2013, Bappeda Provinsi DIY

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD

A. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN APBN

Sebagai bagian dari kesatuan penganggaran pembangunan secara nasional, asumsi-asumsi dalam penetapan APBN memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi penganggaran di daerah. Tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2013 yaitu **“Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”**. Tema ini mengandung 2 (dua) kata kunci yaitu: *pertama*, memperkuat perekonomian domestik; dan *kedua*, peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat. Penentuan tema tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing nasional guna menghadapi perlambatan perekonomian dunia dan persaingan yang semakin ketat, di samping itu potensi perekonomian domestik yang besar akan lebih ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan dan memperluas kesejahteraan rakyat.

Pertumbuhan investasi, baik dari dalam maupun dari luar negeri, terus didorong yang didukung oleh pembangunan infrastruktur. Pembangunan di bidang sarana dan prasarana dibangun untuk memperkuat konektivitas nasional, ketahanan energi dan ketahanan pangan, melalui pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan kerjasama pemerintah dan swasta. Daya saing infrastruktur nasional merupakan prioritas yang mendapat alokasi terbesar. Di dalam prioritas ini kegiatan-kegiatan yang terkait dengan *domestic connectivity* dan pengembangan koridor ekonomi menjadi fokus utama.

Hambatan perekonomian, terutama birokrasi dan korupsi, akan ditangani secara serius agar tercipta iklim investasi dan usaha yang sehat. Reformasi birokrasi akan dituntaskan di tingkat pusat, dan diperluas ke Pemerintah Daerah. Kualitas reformasi birokrasi juga semakin ditingkatkan melalui pelaksanaan *quality assurance*, penyelenggaraan forum *knowledge management* dan *change management*, serta pelatihan *reform leader academy* untuk membentuk pemimpin di lingkungan birokrasi pemerintah. Sejalan hal tersebut, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi ditingkatkan, agar terwujud pelayanan publik yang berkualitas.

Pembangunan infrastruktur, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kesehatan dan pendidikan sangat penting untuk mendorong produktivitas ekonomi. Pembangunan pendidikan diprioritaskan pada pemenuhan layanan pendidikan dasar yang berkualitas, perluasan dan pemerataan akses pendidikan menengah

yang bermutu untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi agar dapat melahirkan lulusan perguruan tinggi yang berdaya saing untuk menjawab tantangan dalam persaingan global, serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru yang disertai oleh upaya pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan. Upaya peningkatan kesehatan penduduk terutama diprioritaskan pada peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak; peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan; peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata; peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan; peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan, dan makanan, serta daya saing produk dalam negeri; serta peningkatan akses pelayanan KB yang berkualitas.

Peningkatan daya saing nasional juga dilaksanakan pada sektor-sektor produksi terutama sektor industri, pertanian, dan pariwisata. Pembangunan industri didorong untuk meningkatkan nilai tambah berbagai komoditi unggulan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya koridor-koridor ekonomi dalam kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Lebih lanjut, upaya mendorong pertumbuhan industri dilakukan dengan kebijakan penumbuhan populasi usaha industri, penguatan struktur industri, dan peningkatan produktivitas usaha industri. Pemerintah juga mendorong akselerasi industrialisasi melalui penumbuhan industri pengolah hasil tambang, penumbuhan industri pengolah hasil pertanian, serta penumbuhan industri padat karya.

Pembangunan sektor pertanian dilaksanakan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dalam rangka mencapai surplus beras nasional sebesar 10 juta ton pada Tahun 2014, peningkatan produksi berbagai komoditi pangan lainnya, diversifikasi pangan dan stabilisasi harga pangan dalam negeri. Ketahanan energi ditingkatkan melalui upaya-upaya perluasan penyediaan listrik terutama non BBM, konversi BBM ke BBG untuk transportasi, serta diversifikasi energi terutama pengembangan energi terbarukan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi harus bersifat inklusif dan berkelanjutan serta berkualitas. Ini akan mempercepat dan memperluas upaya pemerataan pembangunan. Percepatan penurunan pengangguran dan kemiskinan menjadi agenda penting selama Tahun 2013. Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan diarahkan juga untuk mengurangi kesenjangan pembangunan, baik antar golongan masyarakat maupun antar daerah.

Upaya penurunan pengangguran dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja fomal, terutama didorong pembangunan industri dalam kerangka MP3EI.

Perhatian khusus diberikan untuk mengatasi pengangguran usia muda yang tingkatnya jauh lebih besar dari tingkat pengangguran secara umum. Percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui peningkatan sinergi dan efektivitas program klaster 1 – 4, dalam kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI). Perbaikan iklim ketenagakerjaan akan ditingkatkan dengan menyempurnakan peraturan ketenagakerjaan, mendorong pelaksanaan negosiasi bipartit, serta penyusunan standar kompetensi. Perhatian juga diberikan pada penempatan, perlindungan, dan pembiayaan tenaga kerja ke luar negeri. Upaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin juga akan didorong oleh berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang pro-rakyat miskin, memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, serta meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Disamping itu, berbagai kebutuhan pokok masyarakat khususnya yang berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat miskin akan dijamin ketersediaannya dengan akses dan harga yang terjangkau. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan langkah terobosan yang secara fundamental dapat menurunkan kemiskinan, sekaligus memperkuat ekonomi rakyat Indonesia.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, di dalam prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, pemerintah melakukan upaya pencegahan dan konservasi terhadap hutan dan lahan kritis. Hal ini juga terkait dengan dukungan terhadap dampak perubahan iklim. Untuk menanggulangi bencana, kapasitas mitigasi bencana seperti penyediaan data yang cepat dan akurat terus ditingkatkan termasuk pemanfaatan iptek dalam mitigasi bencana.

Untuk menghadapi lingkungan strategis yang penuh gejolak, daya tahan perekonomian terus diperkuat yang menyertai upaya stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan terus diarahkan untuk memperkuat fundamental ekonomi. Stabilitas ekonomi dijaga melalui pengamanan pasokan bahan makanan, sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter, dan ketahanan fiskal. Pasokan bahan makanan diupayakan dengan meningkatkan produksi bahan pokok dengan penyempurnaan sistem distribusi sehingga kebutuhan pokok rakyat dapat tersedia. Kebijakan moneter akan dilaksanakan secara berhati-hati dan pelaksanaan kebijakan fiskal akan diarahkan secara kesinambungan fiskal dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Di sisi pengelolaan keuangan negara, ketahanan fiskal yang membaik harus terus dipertahankan. Ketahanan fiskal harus terus diperkuat demi mendukung pencapaian stabilitas ekonomi. Di sisi penerimaan negara, berbagai upaya untuk peningkatan penerimaan pajak perlu terus dilanjutkan, sedangkan di sisi belanja negara, arah dan besaran pengeluaran perlu terus dipertajam seiring dengan peningkatan alokasi anggaran untuk belanja pegawai serta transfer ke daerah meningkat.

Keberlanjutan pembangunan secara menyeluruh tidak terlepas dari stabilitas sosial, politik, dan keamanan yang mantap serta kemampuan pertahanan dalam menjaga kepentingan nasional terhadap berbagai ancaman dari luar. Keamanan dalam negeri terus diperkuat, untuk menciptakan situasi aman dan damai. Dalam rangka memantapkan konsolidasi demokrasi, pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2014 akan dipersiapkan sebaik-baiknya sejak Tahun 2013. Untuk memperkuat pertahanan nasional, pembangunan *Minimum Essential Force* akan dipercepat.

Upaya pembangunan dengan melaksanakan kebijakan yang dibiayai APBN berdasarkan beberapa asumsi. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2013 diperkirakan sebesar 6,8-7,2%, inflasi 4,5-5,5%, suku bunga SPN 3 bulan sebesar 4,5-5,5%, nilai tukar Rupiah Rp8700-Rp9300 per dolar AS, Indonesian Crude Price (ICP) 100-120 dolar AS, serta lifiting minyak 910-940 ribu barel per hari. Pengangguran terbuka akan menurun menjadi berkisar antara 6,0 – 6,4 persen dari angkatan kerja dan jumlah penduduk miskin menjadi berkisar antara 9,5 – 10,5 persen pada Tahun 2013. Dari kondisi global Tahun 2013, perekonomian dunia diperkirakan akan tumbuh lebih baik dibanding Tahun 2012, dengan asumsi perekonomian eropa yang mulai membaik dan ekonomi AS yang telah berangsur pulih. Namun demikian masih terdapat risiko global yang perlu diwaspadai yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional. Risiko tersebut diantaranya adalah: (i) krisis utang Eropa terus berlanjut dan pemulihan ekonomi AS berlangsung lambat; (ii) krisis politik di Afrika Utara dan Timur Tengah tidak membaik, serta (iii) meningkatnya perubahan iklim global.

B. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN APBD

Dengan mengacu pada tema pembangunan nasional Tahun 2013, tema pembangunan Provinsi DIY pada Tahun 2013 adalah **"Penguatan Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat"**. Berdasarkan tema tersebut maka kebijakan ekonomi makro Provinsi DIY Tahun 2012 diarahkan untuk: 1) Penguatan daya saing (*competitiveness*) daerah dimaknai sebagai upaya mengatasi perubahan dan persaingan global dan nasional, menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dibanding daerah lain, membentuk/menawarkan lingkungan yang lebih produktif bagi bisnis, menarik *talented people*, investasi, dan *mobile factors* lain, serta peningkatan kinerja berkelanjutan; 2) Penguatan daya tahan (*resillience*) ekonomi dimaknai sebagai upaya untuk menciptakan perekonomian yang tidak mudah terombang ambing oleh gejolak yang datang, baik dari dalam maupun dari luar. Penguatan daya tahan juga dimaknai sebagai usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan

pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan organisasi masyarakat untuk menjaga momentum dan stabilitas ekonomi pada suatu wilayah dari perubahan ekonomi global (seperti kenaikan bahan bakar minyak); dan 3) Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang telah mencapai kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik dari aspek materi maupun spritual. Pengembangan potensi masyarakat merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang lebih luas dan berkeadilan.

Dengan kebijakan yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat melalui penguatan daya saing dan daya tahan ekonomi daerah, maka asumsi kondisi regional Provinsi DIY yang digunakan dalam RAPBD Provinsi DIY Tahun 2013 adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi berkisar antara 5,1%-5,3%;
2. Tingkat inflasi berkisar pada angka 5,10%- 5,60%;
3. Pertumbuhan investasi berkisar antara 2,59% - 4,36%
4. Tingkat ICOR berkisar di antara 4,80 – 5,00

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

A. PENDAPATAN DAERAH

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DIY dari sisi pendapatan bersumber pada ketiga jenis penerimaan daerah tersebut.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan penerimaan (intensifikasi)
- b. Penggalian sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi)
- c. Optimalisasi Aset Daerah
- d. Peningkatan kinerja BUMD
- e. Peningkatan Dana Perimbangan

2. Target Pendapatan Daerah

Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2012, pendapatan daerah Provinsi DIY dianggarkan sebesar Rp 1,935 Trilyun, sedangkan pada KUA PPAS Tahun Anggaran 2013 diproyeksikan sebesar Rp 2,112 Trilyun sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 176,955 Milyar atau naik sebesar 9,14 %. Pendapatan Daerah Provinsi DIY Tahun 2013 tersebut diproyeksikan berasal dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 968,396 Milyar.
- b. Dana Perimbangan sebesar Rp 854,608 Milyar.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 289,397 Milyar.

Uraian dari masing-masing kelompok Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri, yang terdiri dari penerimaan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pada Tahun Anggaran 2013 Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp 968,396 Milyar, apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2012 yang dianggarkan sebesar Rp 800,156 Milyar mengalami kenaikan sebesar Rp 168,240 Milyar atau sebesar 21,03 %. Kenaikan tersebut berasal dari Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Uraian dari jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Jenis penerimaan pajak daerah terdiri dari :

a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):

APBD Murni Tahun anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp 316,471 Milyar, sedangkan Tahun anggaran 2013 sebesar Rp 396,286 Milyar, naik sebesar Rp 79,814 Milyar atau 25,22 %.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan karena adanya penambahan kendaraan bermotor pada Tahun 2012, sehingga akan menambah besarnya potensi pajak kendaraan pada Tahun 2013. Adanya kemudahan fasilitas mengurus pajak kendaraan bermotor bekerjasama dengan BPD dan Pengelola Pusat Perbelanjaan di Yogyakarta. Diberlakukannya ketentuan pajak progresif bagi kendaraan bermotor untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya, bagi kendaraan roda empat.

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB):

APBD Murni Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp 257,623 Milyar, sedangkan Tahun anggaran 2013 sebesar Rp 338,819 Milyar, naik sebesar Rp 81,196 Milyar atau 31,52%.

Kenaikan ini terjadi karena adanya perubahan tarif BBN-KB I (kendaraan baru) berdasarkan Undang-undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan adanya pertumbuhan kenaikan kendaraan bermotor baru.

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB):

APBD Murni Tahun anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp 115,367 Milyar, sedangkan Tahun anggaran 2013 sebesar Rp 120 Milyar sehingga naik sebesar Rp 4,632 Milyar atau 4,02 %.

Kenaikan ini terjadi karena diprediksikan meningkatnya jumlah pemakaian Bahan Bakar Minyak pada Tahun 2013 seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor.

d) Pajak Air Permukaan (PAP):

APBD Murni Tahun anggaran 2012 ditargetkan sebesar Rp 110,00 juta, sedangkan Tahun 2013 sebesar Rp 111,800 juta sehingga naik sebesar Rp 1,800 Juta atau 1,64 %.

2) Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah APBD Murni Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp 36,228 Milyar sedangkan Tahun anggaran 2013 sebesar Rp 33,129 Milyar turun sebesar Rp 3,098 Milyar atau 8,55 %. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

a) Retribusi Jasa Umum

APBD Murni Tahun anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp 3,629 Milyar sedangkan Tahun anggaran 2013 sebesar Rp 3,650 Milyar atau naik sebesar Rp 21,451 juta atau 0,59 %.

Kenaikan dari penerimaan retribusi jasa umum, karena adanya peningkatan jumlah atau jenis layanan pada beberapa obyek retribusi juga adanya kenaikan tarif masing-masing jenis layanan.

b) Retribusi Jasa Usaha

APBD Murni Tahun anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp 32,366 Milyar sedangkan Tahun anggaran 2013 sebesar Rp 29,414 Milyar, turun sebesar Rp 2,95 Milyar atau 9,12 %.

Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan pada jasa pelayanan Bus Trans Jogja karena masih belum dapat beroperasi 20 bus penumpang.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

APBD Murni Tahun anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp 232,40 juta, sedangkan Tahun anggaran 2013 ditargetkan

sebesar Rp 64,50 juta turun sebesar Rp 167,90 juta atau 72,24 %.

Penurunan karena menyesuaikan kewenangan atas pungutan jenis retribusi perizinan tertentu, yang disesuaikan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berasal dari PD. Tarumartani, Bank BPD, PT. Anindya Mitra Internasional, PT. Yogya Indah Sejahtera, PT. Asuransi Bangun Askrida dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP). Pada APBD Murni Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp 31,863 Milyar, sedangkan pada Tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp 36,328 Milyar, naik sebesar Rp 4,464 Milyar atau 14,01 %. Hal ini karena ada prediksi kenaikan deviden dan dana pembangunan dari Bank BPD dan kenaikan laba dari BUKP.

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pos pendapatan dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah.

Pada APBD Murni Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp 42,492 Milyar, sedangkan pada Tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp 43,721 Milyar, naik sebesar Rp 1,228 Milyar atau 2,89 %. Hal ini karena ada prediksi kenaikan pendapatan serta penambahan dari dana cadangan.

b. Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari:

- 1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
- 2) Dana Alokasi Umum; dan
- 3) Dana Alokasi Khusus.

Target penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2013 sebesar Rp 854,608 Milyar apabila dibandingkan dengan APBD Murni anggaran Tahun 2012 sebesar Rp 850,513 Milyar mengalami kenaikan sebesar Rp 4,095 Milyar atau naik 0,48 %. Prediksi kenaikan ini diperkirakan karena adanya kenaikan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

APBD Murni Tahun anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp 74,403 Milyar sedangkan Tahun anggaran 2013 sebesar Rp 97,551 Milyar, naik sebesar Rp 23,148 Milyar atau 31,11 %.

2) Dana Alokasi Umum

Mengingat besaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun anggaran 2013 belum ditetapkan oleh Pemerintah, maka sesuai Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013, targetnya mengacu pada Tahun anggaran 2012, yaitu sebesar Rp 757,056 Milyar.

3) Dana Alokasi Khusus

Mengingat besaran Dana Alokasi Khusus Tahun anggaran 2013 belum ditetapkan oleh Pemerintah, maka sesuai Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013, Dana Alokasi Khusus Tahun anggaran 2013 belum ditargetkan.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri. APBD Murni Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp 284,778 Milyar, sedangkan Tahun anggaran 2013 dianggarkan sebesar Rp 289,397 Milyar, naik sebesar Rp 4,619 Milyar atau 1,62%.

3. Upaya Pencapaian Target

Pencapaian target PAD dapat di tempuh dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan. Intensifikasi dikaitkan dengan usaha untuk melakukan pemungutan yang intensif, yaitu secara ketat, giat dan teliti, sedangkan ekstensifikasi berhubungan dengan usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru.

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah melalui:

- 1) Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasian alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan;
- 2) Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

B. BELANJA DAERAH

1. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan adalah sebesar Rp 2,250 trilyun, digunakan untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 887,681 milyar, digunakan untuk belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa dan belanja tak terduga. Belanja Langsung sebesar Rp 1,363 triliun digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang ada di dalam program/kegiatan yang dijabarkan dalam urusan wajib dan urusan pilihan di masing-masing SKPD sesuai prioritas pembangunan.

2. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan desa, bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan desa, dan belanja tidak terduga.

a. Belanja Pegawai

Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2013 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2013.

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 1 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan

Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD, baik aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan maupun penentuan kriterianya harus ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

b. Bantuan Sosial

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial berpedoman pada peraturan kepala daerah yang ditetapkan.

c. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota dan

pemerintah desa. Belanja Bagi Hasil ini merupakan pembagian hasil/realisasi pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah.

d. Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa. Belanja bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi kabupaten/kota dan atau desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program/kegiatan prioritas yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota atau dalam rangka akselerasi pembangunan desa.

e. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

3. Kebijakan Belanja Langsung

Belanja Langsung digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas pembangunan daerah. Tema pembangunan Provinsi DIY pada Tahun 2013 adalah: *"Penguatan Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat"*. Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut dan pencapaian visi jangka panjang dan jangka menengah DIY, serta sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional, maka prioritas pembangunan daerah Provinsi DIY Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;

Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta dalam rangka mendukung terlaksananya tata kelola SKPD yang lebih baik dan meningkatkan penilaian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian tanpa paragraf penjelas.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung misi 3 RPJMD (meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis *Good Governance*).

2. Pendidikan;

Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui:

- a. Peningkatan angka dan kualitas lulusan serta standar pencapaian di semua jenjang dan jalur pendidikan;
- b. Peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan terutama di kantong-kantong kemiskinan;
- c. Pengembangan pendidikan yang berbasis multikultur untuk meningkatkan wawasan, keterbukaan, dan toleransi;
- d. Peningkatan budaya baca masyarakat;
- e. Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun;
- f. Penciptaan iklim belajar yang kondusif bagi pelajar;
- g. Peningkatan kapasitas pemuda, prestasi dan sarana olahraga.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD (mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis, dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung).

3. Kesehatan;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan:

- a. Kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi masyarakat miskin;
- b. Aksesibilitas dan kualitas pelayanan KB untuk meningkatkan kepesertaan KB dan kesehatan reproduksi.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD (mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis, dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung).

4. Penanggulangan kemiskinan;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin terutama di daerah kantong-kantong kemiskinan dan dalam rangka meningkatkan:

- a. Kualitas pengelolaan ketenagakerjaan;
- b. Kualitas pengelolaan ketransmigrasian;
- c. Kemandirian dan keberdayaan masyarakat.

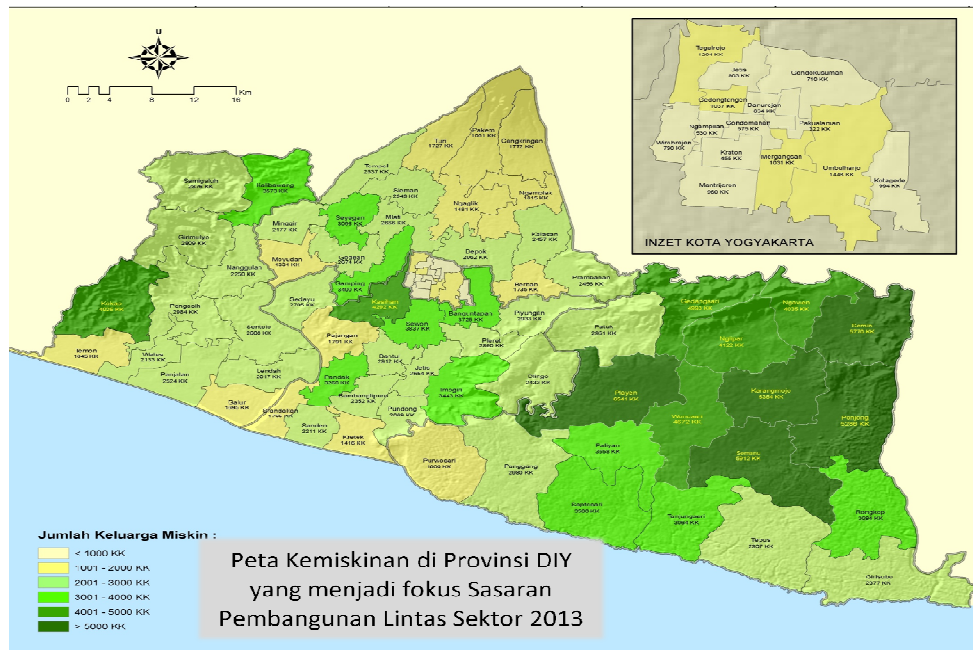
Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD (mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis, dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung).

5. Ketahanan pangan;
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan melalui diversifikasi pangan untuk memenuhi konsumsi energi dan protein masyarakat.
Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD (Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera).
6. Infrastruktur;
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas, pemerataan prasarana dan sarana publik terutama di daerah kantong-kantong kemiskinan, serta dalam rangka meningkatkan kemanfaatan ruang.
Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD (Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik).
7. Iklim investasi dan usaha;
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, kepariwisataan yang berdaya saing tinggi, dan perekonomian daerah yang adaptif melalui pemberdayaan UMKM dan penguatan iklim investasi untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya guna mengurangi pengangguran.
Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD (Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera).
8. Energi;
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap energi terutama energi baru terbarukan, dan meningkatkan rasio elektrifikasi serta efisiensi konsumsi energi.
Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD (Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik).

9. Lingkungan hidup dan bencana;
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, dan ketahanan masyarakat terhadap bencana.
Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD (Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik).
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik;
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah yang relatif tertinggal di daerahnya, sehingga diharapkan wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain.
Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD (Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik).
11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka:
 - a. Pengembangan dan pelestarian budaya lokal, kawasan budaya, dan benda cagar budaya;
 - b. Pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. Pengembangan inovasi teknologi.Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD (mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis, dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung).

Selain pendekatan yang bersifat sektoral, rencana pembangunan Tahun 2013 juga menggunakan pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan tersebut dilakukan guna mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, dengan penanganan secara lintas sektoral pada setiap wilayahnya. Lokasi yang akan menjadi perhatian utama dalam pembangunan Tahun 2013 adalah di daerah kantong-kantong kemiskinan dimana keluarga miskin tinggal. Sebaran daerah kantong-kantong kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada peta berikut ini.

Gambar IV.1
Sebaran Penduduk Miskin Provinsi DIY



Dilihat dari sebaran jumlah keluarga miskin, kantong-kantong kemiskinan sebagian besar terdapat di wilayah Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo.

Namun demikian, terdapat 16 titik kecamatan di empat kabupaten (Sleman, Gunungkidul, Bantul, Kulon Progo) dan 4 kecamatan di Kota Yogyakarta yang menjadi fokus sasaran pembangunan lintas sektor.

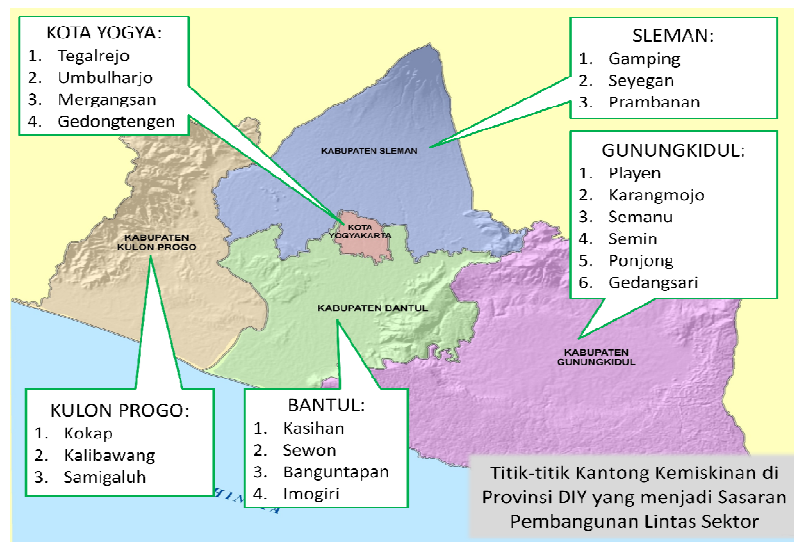
Titik-titik tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.1
Kecamatan yang akan menjadi fokus sasaran pembangunan lintas sektor Tahun 2013

| No | Kabupaten/Kota | | Kecamatan |
|----|----------------|---|-------------|
| 1 | Sleman | 1 | Gamping |
| | | 2 | Seyegan |
| | | 3 | Prambanan |
| 2 | Bantul | 1 | Kasihan |
| | | 2 | Sewon |
| | | 3 | Banguntapan |
| | | 4 | Imogiri |

| No | Kabupaten/Kota | | Kecamatan |
|----|-----------------|---|--------------|
| 3 | Gunungkidul | 1 | Playen |
| | | 2 | Karangmojo |
| | | 3 | Semanu |
| | | 4 | Semin |
| | | 5 | Ponjong |
| | | 6 | Gedangsari |
| 4 | Kulon Progo | 1 | Kokap |
| | | 2 | Kalibawang |
| | | 3 | Samigaluh |
| 5 | Kota Yogyakarta | 1 | Tegalrejo |
| | | 2 | Umbulharjo |
| | | 3 | Mergangsan |
| | | 4 | Gedongtengen |

Gambar IV.2
Kecamatan yang akan menjadi fokus sasaran pembangunan lintas sektor Tahun 2013



Di dalam Buku III RKP Tahun 2013, salah satu sasaran utama yang harus dicapai DIY pada Tahun 2013 adalah meningkatnya standar hidup masyarakat, yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup serta pengangguran. Target untuk DIY dalam Buku III RKP Tahun 2013 tersebut ditunjukkan dalam tabel indikator sasaran sebagai berikut:

| Provinsi | Pertumbuhan Ekonomi 1) (%) | Kemiskinan 2) (%) | Pengangguran 3) (%) |
|---------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| DI Yogyakarta | 5,85 – 6,50 | 13,28 | 5,05 – 4,60 |

Sumber: RKP 2013 Buku III

Keterangan: 1) Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

2) Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk.

3) Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja.

| Provinsi | Angka Kematian Bayi 1) | Rata-Rata Lama Sekolah 2) Sekolah | Umur Harapan Hidup 3) Hidup |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| DI Yogyakarta | 8 | 9,34 | 76,2 |

Sumber: RKP 2013 Buku III

Keterangan: 1) Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia

1 Tahun per 1000 kelahiran hidup.

2) Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah Tahun yang dihabiskan oleh

penduduk berusia 15 Tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan

formal yang pernah dijalani.

3) Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.

Kebijakan Belanja langsung diarahkan untuk membiayai program/kegiatan prioritas pembangunan daerah tersebut.

Adapun program prioritas berdasarkan masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- c. Program Pendidikan Menengah
- d. Program Pendidikan Non Formal

- e. Program Pendidikan Luar Biasa
 - f. Program peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
 - h. Program Pendidikan Tinggi
 - i. Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka
 - j. Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada BLUD
2. Kepemudaan dan Olahraga
- a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
 - b. Program peningkatan peran serta kepemudaan
 - c. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda
 - d. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
 - e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
 - f. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda
3. Komunikasi dan Informatika
- a. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
 - b. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
 - c. Program Fasilitasi, Pembinaan, Pengendalian Pos, Telekomunikasi dan Frekuensi
4. Kebudayaan
- a. Program Pengembangan Nilai Budaya
 - b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
 - d. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
5. Sosial
- a. Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan Penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya
 - b. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
 - c. Program Pembinaan Anak terlantar
 - d. Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma

- e. Program pembinaan panti asuhan/ jompo
 - f. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
 - g. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
 - h. Program pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial (K3S)
6. Kesehatan
- a. Program Penanganan Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin
 - b. Program Pelayanan Kesehatan
 - c. Program pengembangan lingkungan sehat
 - d. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
 - e. Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Makanan
 - f. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - g. Program Pendidikan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
 - h. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata
 - i. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata
 - j. Program Pengembangan Manajemen Kesehatan
 - k. Program Sistem Informasi Kesehatan
 - l. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 - m. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - n. Program Kesehatan Keluarga
 - o. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD
7. Keluarga Berencana
- a. Program Keluarga Berencana
 - b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
 - c. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja
 - d. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS
 - e. Program Pelayanan Kontrasepsi

8. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 - a. Program Pencegahan Dini Bencana
 - b. Program Penanggulangan Korban Bencana
 - c. Program Pemeliharaan Kam-tramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - d. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
 - e. Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - f. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
 - g. Program Pendidikan Politik Masyarakat
 - h. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - i. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - j. Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat
9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi perdesaan
 - b. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Masyarakat Desa Program peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - d. Program peningkatan Prasarana/Sarana dan Penataan Administrasi Pemerintah Desa
10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
 - a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
 - b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - c. Program Peningkatan Peranserta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan
 - d. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
11. Kelautan dan Perikanan
 - a. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar
 - b. Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan

- c. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
- d. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
- e. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
- f. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat
- g. Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam
Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Biota Laut
- h. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- i. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- j. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

12. Pertanian

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
- d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
- e. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
- f. Program Peningkatan Produksi Pertanian
- g. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Strategis
- h. Program Peningkatan Produksi Peternakan
- i. Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani
- j. Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan

13. Ketahanan Pangan

- a. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan Pangan
- b. Program Pemberdayaan Penyuluhan

14. Pariwisata

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- c. Program Pengembangan Kemitraan

15. Koperasi dan UKM

- a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
- c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UKM

16. Industri

- a. Program Pengembangan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
- b. Program Pengembangan IKM
- c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- d. Program Penataan Struktur industri
- e. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
- f. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif

17. Penanaman Modal

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- c. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

18. Perdagangan

- a. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
- b. Program Peningkatan Pengembangan Ekspor
- c. Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- d. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- e. Program Persaingan Usaha

19. Ketenagakerjaan

- a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis kompetensi
- b. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis masyarakat
- c. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis kewirausahaan
- d. Program peningkatan kesempatan kerja

- e. Program pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- f. Program pelayanan pengawasan lembaga ketenagakerjaan
- g. Program peningkatan mutu pelayanan lembaga ketenagakerjaan

20. Ketrasmigrasian

- a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
- b. Program Transmigrasi Regional

21. Kehutanan

- a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
- b. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
- c. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- d. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
- e. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

22. Perencanaan Pembangunan

- a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- c. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
- d. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana
- e. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
- f. Program Pengembangan Data/Informasi
- g. Program Pengendalian Pembangunan Daerah

23. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

- a. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah
- b. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- c. Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- d. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- e. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
- f. Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan

- g. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
 - h. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah
 - i. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
 - j. Program Perbaikan Kearsipan
 - k. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
 - l. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kada/Wakada
 - m. Program Analisis Kebijakan Pembangunan
 - n. Program Penelitian dan Pengembangan
 - o. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - p. Program Pengembangan Kehidupan Beragama
 - q. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kepegawaian
 - r. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - s. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
 - t. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian
 - u. Program Pendidikan Kedinasan
 - v. Program Penelitian dan Pengembangan Kediklatan
 - w. Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antara Daerah
 - x. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - y. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
 - z. Program Pengawasan Produk Hukum
 - aa. Program Bantuan dan Layanan Hukum
 - bb. Program Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - cc. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
 - dd. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
 - ee. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
 - ff. Program Pengembangan investasi dan aset daerah
 - gg. Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro
 - hh. Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
24. Energi dan Sumberdaya Mineral
- a. Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar

- b. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan
- c. Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Energi
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
- e. Program Pengelolaan Air Tanah Berwawasan Konservasi

25. Kearsipan

- a. Program Perbaikan Sistem Kearsipan
- b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip
- c. Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi

26. Statistik

Program Pengembangan Statistik Daerah

27. Kependudukan dan Catatan Sipil

Program Penataan Administrasi Kependudukan

28. Pertanahan

- a. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
- b. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- c. Program Sistem Pendaftaran Pertanahan
- d. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

29. Pekerjaan Umum

- a. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- b. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
- c. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
- d. Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur Jalan
- e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
- f. Program Pengendalian Banjir
- g. Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum
- h. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
- i. Program Pelayanan Jasa Pengujian

- j. Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum
- k. Program Pengembangan Manajemen Laboratorium
- l. Program Pengaturan Jasa Konstruksi
- m. Program Pengawasan Jasa Konstruksi
- n. Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah
- o. Program Pengelolaan Persampahan
- p. Program Pengembangan Kawasan Perkotaan
- q. Program Pengembangan Kawasan Perdesaan
- r. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
- s. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi

30. Perumahan

- a. Program Pengembangan Perumahan
- b. Program Lingkungan Sehat Perumahan
- c. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
- d. Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh
- e. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam

31. Penataan Ruang

- a. Program Perencanaan Tata Ruang
- b. Program Pemanfaatan Ruang
- c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

32. Perhubungan

- a. Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
- b. Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas
- c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan
- e. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- f. Program Penurunan Pelanggaran Muatan Lebih
- g. Program Peningkatan Layanan Sertifikasi Kelaikan Transportasi

33. Lingkungan Hidup

- a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- b. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- c. Program Pengembangan Kinerja Persampahan
- d. Program Pengelolaan RTH
- e. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- f. Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi Sumber Daya Alam dan LH

34. Perpustakaan

- a. Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
- b. Program Pengembangan Budaya Baca
- c. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

C. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-Tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah.

Pada Tahun 2013 Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) sebesar Rp 157,244 milyar, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sebesar Rp 27,574 milyar, dan Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan sebesar Rp 1,116 milyar.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-Tahun berikutnya.

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SILPA).

Pada Tahun 2013 Pengeluaran Pembiayaan berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp 47,574 milyar.

Berdasarkan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah di atas, maka tabel Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2013

| U R A I A N | Tahun Berjalan Murni 2012 Rp | Proyeksi/Target Tahun 2013 Rp | Tambah/(Kurang) Rp | Naik/ (Turun) % |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PENDAPATAN DAERAH | | | | |
| Pendapatan Asli Daerah | 800.156.497.767 | 968.396.692.277 | 168.240.194.510 | 21,03 |
| Pajak Daerah | 689.572.065.000 | 855.217.610.000 | 165.645.545.000 | 24,02 |
| Retribusi Daerah | 36.228.288.350 | 33.129.555.614 | (3.098.732.736) | -8,55 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 31.863.499.207 | 36.328.245.281 | 4.464.746.074 | 14,01 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 42.492.645.210 | 43.721.281.382 | 1.228.636.172 | 2,89 |
| | | | | |
| Dana Perimbangan | 850.513.085.724 | 854.608.414.754 | 4.095.329.030 | 0,48 |
| Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 74.403.649.724 | 97.551.718.754 | 23.148.069.030 | 31,11 |

| U R A I A N | Tahun Berjalan Murni 2012 Rp | Proyeksi/Target Tahun 2013 Rp | Tambah/(Kurang) Rp | Naik/ (Turun) % |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| Dana Alokasi Umum | 757.056.696.000 | 757.056.696.000 | - | 0,00 |
| Dana Alokasi Khusus | 19.052.740.000 | - | (19.052.740.000) | -100,00 |
| | | | | |
| Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 284.778.165.000 | 289.397.766.250 | 4.619.601.250 | 1,62 |
| Hibah | 5.496.225.000 | 8.606.826.250 | 3.110.601.250 | 56,60 |
| Dana Darurat | - | - | - | |
| Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | - | - | - | |
| Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 279.281.940.000 | 280.790.940.000 | 1.509.000.000 | 0,54 |
| Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | - | - | - | |
| Jumlah Pendapatan | 1.935.447.748.491 | 2.112.402.873.281 | 176.955.124.790 | 9,14 |
| | | | | |
| BELANJA DAERAH | | | | |
| Belanja Tidak Langsung | 1.267.028.062.579 | 887.681.459.536 | (379.346.603.043) | -29,94 |
| Belanja Pegawai | 490.659.483.382 | 484.183.445.536 | (6.476.037.846) | -1,32 |
| Belanja Bunga | - | - | - | |
| Belanja Subsidi | - | - | - | |
| Belanja Hibah | 355.793.657.000 | 45.548.000.000 | (310.245.657.000) | -87,20 |
| Belanja Bantuan Sosial | 94.674.768.000 | - | (94.674.768.000) | -100,00 |
| Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 251.788.473.835 | 295.450.014.000 | 43.661.540.165 | 17,34 |
| Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa | 54.111.680.362 | 47.500.000.000 | (6.611.680.362) | -12,22 |
| Belanja Tidak Terduga | 20.000.000.000 | 15.000.000.000 | (5.000.000.000) | -25,00 |
| | | | | |
| Belanja Langsung (Program/Kegiatan) | 857.260.646.732 | 1.363.082.310.384 | 505.821.663.652 | 59,00 |
| Belanja Pegawai | 111.508.039.921 | | | |
| Belanja Barang dan Jasa | 527.793.940.256 | | | |
| Belanja Modal | 217.958.666.554 | | | |
| Jumlah Belanja | 2.124.288.709.311 | 2.250.763.769.920 | 126.475.060.609 | 5,95 |
| | | | | |
| Surplus/(Defisit) | (188.840.960.820) | (138.360.896.639) | 50.480.064.181 | -26,73 |

| U R A I A N | Tahun Berjalan Murni 2012 Rp | Proyeksi/Target Tahun 2013 Rp | Tambah/(Kurang) Rp | Naik/ (Turun) % |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <i>I</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| PEMBIAYAAN | | | | |
| Penerimaan Pembiayaan | | | | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) | 191.724.891.796 | 157.244.827.615 | (34.480.064.181) | -17,98 |
| Pencairan Dana Cadangan | - | - | - | |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | - | - | - | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | - | - | - | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman (Penerimaan Dana Bergulir) | - | 27.574.600.000 | 27.574.600.000 | |
| Penerimaan Piutang Daerah | 28.574.600.000 | - | (28.574.600.000) | -100,00 |
| Penerimaan dari biaya penyusutan kendaraan | 1.116.069.024 | 1.116.069.024 | | 0,00 |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 221.415.560.820 | 185.935.496.639 | (35.480.064.181) | -16,02 |
| Pengeluaran Pembiayaan | | | | |
| Pembentukan Dana Cadangan (Tahun ke 3 - 7) | - | - | - | |
| Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 32.574.600.000 | 47.574.600.000 | 15.000.000.000 | 46,05 |
| Pembayaran Pokok Utang | - | - | - | |
| Pemberian Pinjaman Daerah | - | - | - | |
| Penyelesaian Kegiatan DPA-L | - | - | - | |
| Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu yang Belum terselesaikan | - | - | - | |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 32.574.600.000 | 47.574.600.000 | 15.000.000.000 | 46,05 |
| Pembiayaan Netto | 188.840.960.820 | 138.360.896.639 | (50.480.064.181) | -26,73 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) | - | - | - | |

BAB V

P E N U T U P

Demikian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran ini disusun dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DIY sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi DIY Tahun Anggaran 2013.

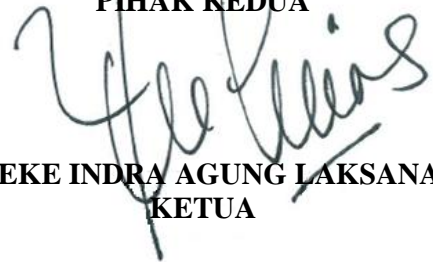
Yogyakarta, 30 Juli 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK PERTAMA



HAMENGKU BUWONO X

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DIY
selaku
PIHAK KEDUA



H. YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA, SE
KETUA



KOL (PURN.) H. SUKEDI
WAKIL KETUA



Hj. TUTIEK MASRIA WIDYO, SE
WAKIL KETUA



JANU ISMADI, SE
WAKIL KETUA